

BAB III

DINAMIKA KEANGGOTAAN INGGRIS DI UNI EROPA

Dalam bab ini penulis membahas tentang penyebab awal mulanya Inggris bergabung dengan Uni Eropa dan bagaimana proses bergabungnya. Serta menjeleaskan dinamika yang terjadi, pro dan kontranya yang merujuk pada referendum Brexit tahun 2016

A. Bergabungnya Inggris ke Uni Eropa

Perang Dunia II memberikan dampak yang serius bagi negara-negara di dunia tidak terkecuali Inggris. Inggris mengalami kerugian yang sangat parah sehingga perekonomiannya anjlok. Keanjlokkan perekonomian ini membuat Inggris mulai melirik organisasi Internasional di kawasan Eropa yaitu *European Economic Community* (EEC) dengan harapan bisa membalikkan keadaan perekonomian Inggris. EEC adalah bentuk organisasi yang ruang lingkungnya besar. Sebelumnya, pada tahun 1951 EEC menggunakan nama ECSC (*European Coal and Steel Community*) dimana organisasi tersebut seputar komunitas besi dan baja saja. Pada tahun 1957 EEC berganti nama menjadi EC (*European Community*) dan melalui traktat Maastricht pada tahun 1992, EC berubah nama menjadi EU (European Union). Proses bergabungnya Inggris dengan ECC melalui jalan yang panjang dan dramatis.

Inggris sempat mengalami penolakan oleh Perancis ketika mengajukan permohonan untuk bergabung dengan ECC. Pengajuan yang dilakukan Inggris pada tahun 1961 ditolak oleh Presiden Perancis yang pada saat itu adalah Charles de Gaulle. Karena pada saat itu Perancis salah satu negara pendiri melihat adanya perbedaan tujuan dengan negara Inggris. EEC berawal dari perundingan tentang kebijakan yang melindungi sector pertanian dalam negeri tetapi bertentangan dengan Inggris karena Inggris mengimpor semua hasil pertaniannya.

Selain itu, kekhawatiran Perancis jika Inggris masuk ke dalam EEC mencapai puncaknya ketika Inggris menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat tentang pertahanan yang dilakukan pada 21 Desember 1962. Dengan persetujuan itu otomatis ada pihak Amerika Serikat di belakang Inggris yang punya pengaruh langsung. Perancis menganggap hal ini adalah ancaman sehingga keputusannya menolak Inggris untuk bergabung menjadi anggota EEC adalah tepat. Inggris terus berusaha meyakinkan de Gaulle bahwa Inggris tidak akan mengubah apapun yang telah disepakati di dalam EEC namun de Gaulle masih khawatir Inggris tidak bisa cepat beradaptasi sehingga Inggris mengalami penolakan dua kali. Setelah negosiasi yang cukup lama, akhirnya Inggris resmi bergabung dengan EEC pada tahun 1973 dimana masa jabatan Charles de Gaulle sebagai Presiden telah berakhir (Lestari, 2017, p. 1026).

Awal bergabungnya Inggris dengan EEC memberikan dampak positif yang signifikan. Perekonomian Inggris cenderung maju bahkan meningkat secara tajam dikarenakan di dalam EEC perdagangan Inggris mengalami kemajuan. Namun, bertolak belakang dengan manfaat yang diterima oleh Inggris, bergabungnya Inggris ke EEC rupanya tidak disertai dengan kemantapan. Pasalnya, baru dua tahun Inggris berada dalam keanggotaan EEC memutuskan untuk berpisah dan menimbang kembali status keanggotaannya. Sosok dibalik keputusan Inggris ini adalah PM Harold Wilson yang berasal dari partai konservatif. Harold Wilson berjanji akan menggelar referendum jika dalam enam bulan keanggotaan Inggris di EEC tidak memberikan perubahan. Keputusan tersebut turut didukung oleh pejabat-pejabat tinggi yang menginginkan Inggris keluar dari keanggotaan EEC. Tetapi sebanyak 67% memilih untuk tetap tinggal. Ketidak mantapan Inggris ini dikarenakan kurang mempunyai rasa memiliki dan ikatan terhadap Benua Eropa yang berdampak pada keanggotaannya saat itu. Inggris banyak tidak mengikuti kebijakan-kebijakan yang diterapkan EEC dan Inggris tidak sepenuhnya meratifikasi perjanjian-perjanjian antar negara-negara anggota. Seperti

penolakan Inggris untuk bergabung ke dalam Eurozone dan Schengen.

Negara-negara anggota menerapkan satu mata uang yang sama yaitu Euro. Namun Inggris tetap menggunakan Poundsterling sebagai mata uangnya dan tidak menggunakan Schengen sebagai visanya. Sehingga Inggris tidak mempunyai hak untuk datang dalam pertemuan-pertemuan penting dan kehilangan haknya untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan tentang perdagangan karena Inggris tidak masuk ke dalam *Eurozone*. Kurang kuatnya ikatan Inggris dengan Uni Eropa ini juga karena dilatarbelakangi oleh kurang baiknya hubungan Inggris dengan negara-negara anggota yang lain, salah satunya Perancis.

Sehingga dalam masa keanggotaannya selama empat puluh tiga tahun di Uni Eropa, Inggris tercatat sebanyak dua kali berupaya untuk keluar dari Uni Eropa yaitu pada tahun 1975 dan tahun 2016. Pada tahun 2016 referendum muncul lagi dengan sebutan referendum Brexit. Buruknya hubungan Inggris di Uni Eropa selama menjadi anggota membuat kubu euroskeptis di Inggris menjadi kuat. Kubu euroskeptis menggalang dukungan masyarakat dan mendengungkan agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Sebelum Brexit, ide penarikan diri Inggris dijadikan komoditas politik oleh partai Konservatif maupun Liberal Demokrat dalam pemilu tahun 2005. Kedua partai menjanjikan referendum kepada masyarakat Inggris jika menang. Namun pada saat itu tidak terlaksana karena Perancis dan Belanda menolak ratifikasi konstitusi Uni Eropa. Tidak berhenti disitu, kubu *Eurosceptic* terus berupaya mengangkat isu referendum. Sehingga pada tahun 2008, pemimpin partai Liberal Demokrat menyerukan kembali referendum tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Tetapi tetap gagal karena pada saat yang bersamaan Inggris diharuskan untuk meratifikasi traktat Lisbon sehingga tidak memungkinkan diadakannya referendum. Referendum Brexit terus dijadikan komoditas politik dalam setiap pemilu raya Inggris. Wacana referendum terus bergulir dan menjadi sorotan yang cukup serius. Hingga pada bulan September tahun 2011

adanya petisi online menyerukan referendum yang telah ditandatangani oleh lebih dari 100.000 masyarakat Inggris. Tujuan dari petisi tersebut adalah untuk mendapatkan persetujuan dari komite bisnis Backbench agar masa depan keanggotaan Inggris di Uni Eropa bisa dibahas lebih lanjut. Hal ini bisa diartikan sebagai mosi yang harus dibahas dalam *House of Commons* karena berasal dari suara masyarakat. Perwakilan Parlemen David Nuttall menawarkan mosi dengan tiga pilihan dalam agenda pembahasan tuntutan referendum tersebut. Pertama, Inggris tetap menjadi negara anggota Uni Eropa seperti sebelumnya. Kedua, Inggris mencabut keanggotaannya di Uni Eropa dan ketiga Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa dengan menegosiasikan kembali kesepakatan-kesepakatan yang sesuai dengan prinsip perdagangan dan kerjasama Inggris. Kemudian mosi tersebut dibawa ke parlemen dan dilakukan voting. Sebesar 483 suara menolak mosi tersebut dan 111 lainnya memilih setuju. Sehingga referendum gagal dilakukan karena lebih banyak yang memilih menolak.

Bergulirnya isu referendum secara terus menerus menandakan bahwa pemahaman tentang anti Eropa di kalangan masyarakat Inggris semakin meningkat. Pada tahun 2012 dukungan *Euroceptic* mencapai angka 65% yang berdampak pada peningkatan dukungan terhadap UKIP sebesar 10% yang mendorong Perdana Menteri David Cameron membawa isu referendum ini dalam pidatonya pada tahun 2013. Referendum Brexit adalah betuk dari janjinya ketika dia terpilih kembali dalam pemilu selanjutnya (Leonard, 2018).

B. Referendum Brexit

Sebelum berbicara tentang sejarah referendum Brexit yang terjadi di Inggris pada tahun 2016 lalu, terlebih dahulu memahami makna dari referendum itu sendiri. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, referendum mempunyai banyak arti. Pertama, merupakan kata benda yang berarti penyerahan kepada khalayak umum suatu masalah dengan tujuan mereka bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil. Referendum dikeluarkan agar masyarakat bisa ikut

andil dalam pengambilan suatu keputusan, jadi tidak bergantung pada rapat atau parlemen. Kedua, masalah atau persoalan yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk pemungutan suara. Segala lapisan masyarakat bisa ikut andil tanpa terkecuali.

Fenomena Brexit muncul ke permukaan dan menjadi perhatian dunia Internasional setelah Perdana Menteri Inggris, David Cameron mendengungkannya dalam kampanye politik. Pasalnya, Cameron ingin mencalonkan menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Tidak hanya Cameron, Brexit merupakan isu utama yang dibawa oleh masing-masing kandidat untuk menarik suara masyarakat Inggris. Brexit dipakai sebagai bahan kampanye karena dia melihat adanya potensi besar di dalamnya. Referendum Brexit adalah janji Perdana Menteri David Cameron jika dia terpilih kembali pada pemilu 2015, menyusul desakan dari anggota partainya sendiri, Partai Konservatif, dan partai sayap kanan anti-imigrasi Inggris, UKIP, yang mengatakan rakyat Inggris tidak pernah lagi menyampaikan aspirasi secara langsung sejak tahun 1975.

Tercatat sebanyak dua kali Inggris mengajukan diri keluar dari Uni Eropa. Masyarakat Inggris sudah berangan-berangan ingin keluar dari Uni Eropa sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu bahkan ketika baru dua tahun menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1975. Referendum pertama dipimpin oleh Partai Buruh yang pada saat itu berkuasa. Tetapi sebanyak 67% masyarakat memilih tetap di Uni Eropa. Sejak referendum terakhir 41 tahun lalu, Uni Eropa telah berubah drastis. Dari Komunitas Ekonomi Eropa yang hanya mengurus perekonomian dan pasar tunggal dengan sembilan anggota, menjadi perserikatan besar beranggotakan 28 negara yang mengatur hampir seluruh lini kebijakan negara-negara Eropa.

Partai-partai sayap kanan anti-imigran seperti Britain First dan UKIP yang dipimpin Nigel Farage adalah pendukung ekstrem keluarnya Inggris dari UE. Seperti yang tercantum dalam Pasal 50 Traktat Lisbon yang ditandatangani semua anggota Uni Eropa pada 2007, negara yang ingin mengundurkan diri diberi waktu dua tahun untuk menggelar

perundingan. Pemerintahan Inggris membuat rancangan undang-undang tentang keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Rancangan undang-undang tersebut ada di pasal 50 tentang Brexit. Kemudian, rancangan tersebut disepakati oleh Parlemen Inggris sehingga pemerintah bisa menerapkannya untuk segera bisa keluar dari Uni Eropa. Seperti yang dilansir dari BBC, kesepakatan dilakukan pada 13 Maret 2017 dengan cara melakukan pemungutan suara. Hasilnya, mayoritas anggota Majelis Tinggi Inggris memilih menyetujui RUU Brexit dengan 274 suara setuju dan 118 suara menolak. Sebagaimana kesepakatan dalam perundingan pengunduran diri harus disetujui mayoritas, yakni 72 persen dari 27 negara anggota Uni Eropa yang mewakili 65 persen populasi, selain harus disetujui anggota parlemen Eropa (Tempo.co, 2017).

C. Pro dan Kontra Referendum Brexit

Rencana keluarnya Inggris dari uni Eropa menciptakan dua kubu yang saling kuat dengan argumennya masing-masing. Keduanya menjadi kubu pro Brexit dan anti Brexit. Kubu yang menolak Inggris keluar dari Uni Eropa, seperti Partai Konservatif dan Partai Buruh berpendapat bahwa banyak keuntungan yang Inggris dapatkan ketika menjadi anggota Uni Eropa. Di bidang perdagangan, Inggris dapat kemudahan Ekspor dan bea cukai ke Uni Eropa mengingat tingkat ekspor Inggris ke negara-negara Eropa sebesar 45%. Selain itu, menteri keuangan Inggris, George Osborne mengeluarkan analisis yang menunjukkan bahwa setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan memberikan dampak yang cukup serius dari segi perekonomian.

Analisis ini dilihat setelah dua tahun Inggris hengkang dari Uni Eropa. GDP Inggris akan mengalami penurunan sebesar 3,6% dan inflasi meningkat sebesar 2,3%. Begitu juga tingkat pengangguran di Inggris akan meningkat sebesar 1,6% dengan jumlah 520.000 jiwa. Upah rata-rata di Inggris menjadi turun sebesar 2,8% karena nilai poundsterling diramalkan turun sebesar 12% serta bisnis properti akan turun menjadi 10%. Analisis tersebut menunjukkan bahwa Inggris mengalami

tekanan ekonomi yang berat sehingga Inggris mengalami keterpurukan jika masyarakat memilih keluar dari Uni Eropa (Lestari, 2017, p. 1026).

Selain itu, menjadi anggota Uni Eropa juga membuat Inggris mempunyai dua perwakilan di pertemuan-pertemuan Internasional, yaitu menteri luar negeri dan pejabat Uni Eropa (Aliya, 2016). Jika melihat lebih dalam lagi, banyak keuntungan yang didapatkan oleh Inggris selama menjadi negara anggota Uni Eropa. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain:

1. Akses Pasar Tunggal Eropa

Pasar tunggal Eropa sangat menguntungkan karena memudahkan negara-negara anggotanya dalam mengalirkan barang dan jasa menciptakan kawasan yang bebas hambatan. Pasar tunggal bisa untuk meningkatkan keuntungan negara dalam perdagangan serta memicu pertumbuhan ekonomi dan membuat kehidupan konsumen lebih mudah. Inggris juga mengalami kemudahan dalam pasar tunggal ini. Kemudahan yang dirasakan Inggris adalah dalam hal ekspor dan bea cukai. Sebesar 51,4% ekspor Inggris masuk ke dalam pasar Uni Eropa. Keuntungan Inggris juga diperkirakan sebesar 4-5% dari total GDP atau setara dengan 62-78 milyar Euro per tahun.

2. Kebebasan mobilitas

Kebebasan mobilitas disini diartikan sebagai kebebasan pergerakan manusia. Kebebasan mobilitas ini diatur dalam perjanjian Schengen. Negara-negara di wilayah Uni Eropa bebas untuk melintasi batas internal tanpa adanya pemeriksaan yang ketat di sejumlah perbatasan. Inggris salah satu negara yang tidak menandatangani perjanjian Schengen turut menikmati kemudahannya karena tercatat sebesar $\frac{3}{4}$ juta penduduk Inggris tersebar di negara-negara Eropa lainnya karena bekerja. Inggris juga dapat menarik pekerja-pekerja yang memiliki keahlian untuk menjadi sumber daya.

3. Investasi

Dengan bergabungnya Inggris ke Uni Eropa membuat aliran investasi ke dalam Inggris meningkat yang juga sebagai dampak dari pasar tunggal Eropa. Inggris adalah salah satu negara yang menjadi negara tujuan investasi dari Uni Eropa. Inggris menerima keuntungan bersih sebesar 47% dari saham yang masuk ke dalam FDI (*Foreign Direct Investment*) di akhir tahun 2011 dengan nilai investasi lebih dari 1,2 triliun dollar. Inggris juga menerima investasi dari negara luar Uni Eropa.

4. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Adanya pasar tunggal Eropa juga menciptakan jutaan lapangan pekerjaan bagi Inggris. Dilihat dari laporan CEBR (*Centre for Economics and Business Research*) pada tahun 2015, sebanyak 3,1 juta pekerjaan di Inggris akibat ekspor Inggris ke Uni Eropa karena pasar tunggal Eropa memudahkan kebebasan mobilitas. Selain itu, para petani di Inggris mendapatkan subsidi yang besar dari Uni Eropa. Dimana Uni Eropa selalu memastikan sektor pertanian Inggris yang memiliki 476.000 pekerja. Banyak juga masyarakat Inggris yang bekerja di kawasan Uni Eropa.

5. Perlindungan Terhadap Konsumen

Perlindungan konsumen sangat diperhatikan betul oleh Uni Eropa dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang keadilan transaksi jual beli. Piagam hak asasi dasar dan traktat-traktat Eropa menyebutkan bahwasanya konsumen harus diperlakukan adil, diberi produk yang sesuai standar serta adanya jaminan ganti rugi jika terjadi suatu kesalahan. Perlindungan terhadap konsumen ini bertujuan agar melindungi kepentingan konsumen dari praktek-praktek yang merugikan dan agar terbebas dari penyalahgunaan iklan dan kecurangan kontrak (Lestari, 2017, p. 1028).

Selain dari keuntungan yang bisa didapatkan, Inggris berperan penting bagi Uni Eropa. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Bidang Pendidikan

Inggris berkontribusi penuh dalam bidang pendidikan seperti yang perankan selama ini. Inggris berperan dalam penelitian dan mobilitas pelajar Eropa. Jumlah peserta yang berasal dari Inggris dalam program penelitian Uni Eropa ini terbanyak dari negara anggota lainnya. Berdasarkan data EUA (European University Association) Tercatat publikasi yang dihasilkan dari kolaborasi Inggris dengan peneliti Uni Eropa adalah sebanyak lebih dari 330.000 antara tahun 2003 hingga 2012.

2. Kontributor Anggaran Uni Eropa

Selama ini Inggris juga menjadi kontributor terbesar di antara negara-negara anggota lainnya di Uni Eropa. Inggris mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, yaitu sebesar 17,8 miliar Euro pada tahun 2015 lalu dipotong menjadi 12,9 miliar Euro. Itu artinya setiap masyarakat Inggris harus menyumbang dana sebesar 200 Euro (Lestari, 2017, p. 1029).

Dengan banyaknya usaha-usaha yang telah dilakukan Inggris dan pengorbanan materi yang tidak sedikit untuk Uni Eropa, sangat disayangkan jika akhirnya memilih untuk keluar dari Uni Eropa sebab Inggris akan rugi dalam segi materi maupun non materi. Sudah banyak yang dilakukan Inggris semasa keanggotannya itu. Keluarnya Inggris juga tidak langsung membuat negara tersebut bebas dari segala urusan di Uni Eropa. Walaupun keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa nantinya dikabulkan, jalan yang ditempuh untuk bebas masih panjang.

Sesuai dengan traktat Lisbon pasal 50 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota yang keluar dari keanggotaan harus membentuk perjanjian-perjanjian baru dengan Uni Eropa. Perjanjian-perjanjian tersebut berupa perjanjian penarikan diri serta hubungan baru dengan Uni Eropa. Dengan tidak bergabungnya lagi dalam Uni Eropa membuat Inggris harus melakukan perjanjian hubungan dagang baru dengan negara-negara yang bukan anggota dari Uni Eropa. Inggris akan diberi

waktu kurang lebih dua tahun untuk mengurus semuanya. Pembuatan perjanjian baru juga sangatlah tidak mudah. Inggris harus mengajukan draft kesepakatan terlebih dahulu kepada dewan Eropa dimana draft tersebut nantinya harus disetujui kurang lebih 20 negara anggota. Setelah itu baru diratifikasi oleh parlemen Eropa. Rumitnya perjuangan masuk menjadi anggota Uni Eropa dan rumitnya mengurus segala hal yang berhubungan dengan Uni Eropa ketika sudah tidak lagi menjadi anggota, dinilai sangat tidak efisien. Inggris berkorban banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengurus segala permasalahan yang ada di dalam negeri.

Lain halnya dengan kubu anti Brexit, kubu pro Brexit berpendapat bahwa Uni Eropa sebagai organisasi supranasional yang memiliki lebih dari 500 juta populasi telah berubah menjadi serikat politik, dan memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan melampaui kebijakan parlemen negara anggotanya (Armandhanu, 2016). Tokoh-tokoh yang mendukung agar Inggris melepaskan diri dari keanggotaan Uni Eropa adalah Michael Gove, menteri kehakiman Inggris, dan Boris Johnson, mantan walikota London. Hampir setengah anggota dewan dari Partai Konservatif juga mendukung kubu ini. Selain itu, ada UKIP (United Kingdom Independence Party) yang menjadi pihak utama yang mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa.

Menurut kubu pro Brexit, tanpa birokrasi Eropa yang ketat dan berbelit, perekonomian Inggris akan lebih bebas menentukan mitra dagangnya sendiri. Kelompok yang antara lain didukung pendiri Reebok Joe Foster itu mengimpikan sebuah perekonomian independen seperti Singapura. Dengan penarikan diri dari Uni Eropa, Inggris akan berdaulat penuh untuk menentukan berbagai kebijakan perdagangan yang dapat diatur sendiri sesuai dengan tujuan politik luar negerinya.

Badan keuangan Inggris memprediksi bahwa GDP Inggris pasca referendum akan meningkat sebesar 6% di tahun 2030 dikarenakan Inggris sangat mandiri dan kuat di segi perdagangan. Kerjasama dengan negara-negara anggota Uni Eropa juga diprediksi akan tetap berlangsung sebab adanya

hubungan saling ketergantungan Inggris dengan beberapa negara seperti Irlandia, Yunani, Jerman dan Polandia. Luasnya kekuasaan Uni Eropa juga menjadikan Inggris kehilangan kedaulatannya. Inggris dianggap tidak bisa mengatur sendiri urusan domestiknya karena terlalu banyak intervensi yang masuk dari Uni Eropa. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikritik oleh Inggris. Salah satunya adalah CAP (*Common Agricultural Policy*).

CAP adalah kebijakan untuk bidang pertanian di Uni Eropa dimana memberikan subsidi bahan pangan dan CAP pengatur harga pokok pertanian. Namun, CAP dianggap hanya menguntungkan negara-negara yang memiliki sektor pertanian besar seperti Jerman dan Perancis. Sedangkan negara lainnya hanya menikmati sebesar 20% saja. Seperti halnya Inggris yang menjadi salah satu kontributor anggaran Uni Eropa hanya mendapat bagian yang sangat kecil sehingga mengundang kekecewaan yang berujung pada kritik terhadap CAP. Inggris. Pada tahun 2005 Perdana Menteri Tony Blair menyatakan bahwa CAP hanya pemborosan dan dengan anggaran 70% dari total anggaran Uni Eropa banyak sekali proyek-proyek pertanian yang tidak efisien. Sehingga Inggris melayangkan tuntutan rebate kepada Uni Eropa dan dikabulkan (Lestari, 2017, p. 1036).

Para pendukung Brexit juga optimis bahwa perekonomian Inggris akan meningkat di luar Uni Eropa karena Inggris tidak perlu lagi menjadi kontributor untuk anggaran Uni Eropa. Anggaran tersebut dibayar dengan iuran rutin anggota setiap tahunnya yang dipergunakan untuk kebijakan-kebijakan Uni Eropa seperti kebijakan pertanian, bantuan bagi negara-negara anggota yang lebih miskin, penelitian dan beberapa proyek pembangunan. Inggris adalah salah satu negara anggota dengan kontribusi terbesar. Jumlah iuran yang harus dibayarkan kepada Uni Eropa lebih besar jumlahnya daripada anggaran dalam negeri sendiri. Pasalnya ketika menjadi anggota Uni Eropa, Inggris diharuskan membayar sebesar 340 Poundsterling tiap tahunnya ke Uni Eropa dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan.

Namun nyatanya Inggris sangat merugi sebab banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh Inggris tidak berbalik sama sekali. Menurut kubu pro Brexit, dana yang tiap tahunnya dikeluarkan untuk Uni Eropa bisa digunakan untuk pengembangan riset dan memajukan industri-industri di Inggris serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Isu yang tak kalah penting lainnya adalah krisis pengungsi yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia.

Berbagai jajak pendapat menyebutkan bahwa krisis pengungsi dan serbuan pengungsi dari negara-negara Timur Tengah Uni Eropa adalah isu terbesar buat kelompok yang menolak Uni Eropa. Hal itu karena kebijakan Uni Eropa membuat bebasnya arus masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa. Brexit juga muncul akibat keresahan masyarakat Inggris soal pengungsi yang menyerbu negaranya. Kebijakan Uni Eropa mengenai kebebasan perpindahan manusia ini meningkatkan populasi di Inggris. Berdasarkan data statistik nasional, sebesar 2 juta lebih warga Uni Eropa tinggal dan menetap di Inggris. CEP (Centre of Economic Performance) menyatakan bahwa selama lebih dari 20 tahun semenjak tahun 1995 jumlah imigran di Inggris meningkat tiga kali lipat menjadi 3,3 jiwa. Hal ini menjadi permasalahan baru dikarenakan imigran yang datang ke Inggris orang-orang yang mencari pekerjaan sedangkan presentase distribusi pekerjaan di Inggris lebih banyak diberikan kepada imigran daripada masyarakat local. Sehingga menyebabkan munculnya persaingan dalam pasar tenaga kerja.

Menurut kubu pro Brexit isu krisis pengungsi menjadi faktor terkuat karena dilihat dari sejarah keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Sejak bergabungnya Inggris di Uni Eropa, Inggris tidak benar-benar berpedoman pada kebijakan-kebijakan dan idealisme Uni Eropa seperti tidak menjadi anggota Schengen Area yang membebaskan imigrasi dan tidak mengadopsi mata uang euro. Alasan Inggris tidak memakai mata uang euro karena ingin memegang kendali penuh atas nilai suku bunga. Jika Inggris menggunakan euro akan berdampak pada kenyamanan investor yang sudah lama menggunakan

4

2

poundsterling. Ketika poundsterling dirubah sesuai dengan nilai euro akan menyebabkan masalah nilai suku bunga. Industri property di Inggris sangat sensitive jika ada perubahan terhadap tarif dasar.

Selain itu, jika Inggris ingin mengadopsi euro sebagai mata uang, Inggris harus melewati lima tahap percobaan tetapi Inggris gagal. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dengan tidak menggunakan mata uang euro secara otomatis

Inggris tidak bergabung dengan Eurozone. Perbedaan cukup

Nampak antara negara anggota dan non anggota Eurozone. Dalam hal ini, Inggris tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dengan negara Eurozone dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan. Kubu pro Brexit merasa ada diskriminasi disini. Inggris merasa dirugikan dengan tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Kemudian, dengan tidak menjadi anggota Schengen Area menjadikan bukti bahwa Inggris tidak menginginkan warga asing untuk masuk dengan mudah.

UKIP sebagai kubu pro Brexit mengatakan, keanggotaan di Uni Eropa membuat Inggris dibanjiri pengungsi yang tidak mempunyai kemampuan sehingga hanya akan menjadi beban yang harus ditanggung negara. UKIP menghendaki Inggris

meniru kebijakan Australia tentang pengungsi. Dengan kebijakan serupa Australia, Inggris hanya menerima orang-orang asing berkemampuan khusus

yang memang dibutuhkan negara itu. Australia contohnya, menerima chef, mekanik, arsitek, dan perawat, karena negara kekurangan tenaga terampil di bidang tersebut. Sementara pendukung keanggotaan Uni Eropa mengatakan laju imigran tidak akan pernah berhenti atau berkurang ke Inggris (Armandhanu, 2016).

Dari berbagai faktor yang disebutkan diatas, mayoritas masyarakat Inggris memilih isu krisis pengungsi yang menjadi alasan kuat untuk Inggris keluar dari Uni Eropa. Seperti jajak pendapat yang dilakukan kepada masyarakat Inggris, sebanyak 63% dari total keseluruhan lebih memilih isu krisis pengungsi daripada isu ekonomi. Itu artinya krisis pengungsi memperoleh perhatian yang cukup serius.